

# Strategi Penanganan Potensi Kerusakan Lingkungan *International Rivers* Terkait Pembangunan Bendungan Xayaburi Di Sungai Mekong, Laos 2008-2016

I Gusti Agung Widaloka<sup>1)</sup>, Putu Ratih Kumala Dew<sup>2)</sup>, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha<sup>3)</sup>  
(1,2,3)Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Email : agungwidaloka@gmail.com, ratihkumaladewi@unud.ac.id, aabasuwisnu@gmail.com

## ABSTRACT

*The Mekong River which has the second highest biodiversity in the world, is threatened by the planned construction of the Xayaburi Dam. The construction of the Xayaburi Dam threatens the diversity of the Mekong River ecosystem and the food security of millions of Lao and Thai riverside villagers. The research method of this paper is qualitative descriptive. This research addresses the question of how International Rivers' strategy in dealing with the threat of environmental damage related to the construction of the Xayaburi Hydropower Dam on the Mekong River, Laos from 2008 to 2016. International Rivers applies the concept of transnational advocacy network strategy as a campaign movement strategy in dealing with the threat of damage to the construction of Xayaburi Dam. The data in this research were analyzed using transnational advocacy network strategy as campaign strategy of non-governmental international organization in international relations perspective.*

**Keyword:** *International Rivers, Laos, Transnational Advocacy Strategy, Xayaburi Dam, Campaign*

## 1. PENDAHULUAN

Sungai Mekong yang berada di Laos menghadapi potensi kerusakan ekosistem yang dampaknya juga mengancam kehidupan penduduk desa yang tinggal di pinggir Sungai Mekong dari Laos hingga Thailand. Sumber potensi yang terjadi pada Sungai Mekong diakibatkan oleh pembangunan Bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Xayaburi oleh Pemerintah Laos yang bekerjasama dengan perusahaan *Ch. Karnchang Public Company*, Thailand. *International Rivers* merupakan sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang berfokus menangani isu kerusakan ekosistem

sungai berupaya melakukan kampanye untuk menekan pembangunan Bendungan PLTA Xayaburi. Pada tahun 2008 *International Rivers* mengutip pernyataan *Mekong River Commission* (MRC) yang menyatakan bahwa pembangunan Bendungan PLTA Xayaburi dilaksanakan dengan mengabaikan himbauan para ilmuwan ahli perikanan dari MRC tentang teknologi yang memudahkan jalur laju migrasi ikan (*fish passage*) pada Bendungan PLTA Xayaburi tidak dapat mengatasi pengurangan dampak terhadap migrasi ikan dalam jumlah yang banyak (*International Rivers*, 1948).

Tahun 2011 *International Rivers* mengeluarkan dokumen tertulis tentang perkiraan dampak pembangunan Bendungan PLTA Xayaburi. Hal ini bertujuan untuk memberitahu publik secara luas tentang dampak yang akan muncul apabila pembangunan Bendungan PLTA Xayaburi terselesaikan. Upaya untuk mencegah ancaman kerusakan pembangunan Bendungan PLTA Xayaburi kemudian dilanjutkan *International Rivers* menuju jalur hukum. *International Rivers* melanjutkan kampanyenya pada tahun 2012 bersama *Northeastern Community Network in 7 Thailand Province* mengajukan tuntutan ke pengadilan Administrasi Thailand di Bangkok. Masyarakat Thailand menuntut keadilan akibat merasa dirugikan oleh perusahaan Ch. Karnchang. Masyarakat mengklaim bahwa seharusnya pemerintah Thailand mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan Bendungan PLTA Xayaburi. Pembangunan Bendungan PLTA Xayaburi akan mengancam mata pencaharian masyarakat Thailand yang bertempat tinggal di sepanjang Sungai Mekong (*International Rivers*, 2012).

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Literatur yang berjudul "Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh *Wilmar International*" yang ditulis oleh Muhammad Virgy dijadikan

sebagai acuan pertama. Dalam tulisan Virgy ini digambarkan upaya penanganan Greenpeace terkait deforestasi hutan yang dilakukan oleh Wilmar Internasional karena melakukan perluasan lahan kelapa sawit berlebihan. Peningkatan perluasan lahan kelapa sawit tersebut tidak memperhatikan dampak terhadap Indonesia. Peningkatan lahan kelapa sawit sebesar 2,77 sampai dengan 4,70 persen per tahun, meskipun pada tahun 2016 mengalami penurunan 0,52 persen. Tahun 2013 lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia sebesar 10,47 juta hektar, kemudian terjadi peningkatan menjadi 11,26 juta hektar pada tahun 2015 atau terjadi peningkatan 7,60 persen.

Greenpeace menduga bahwa Wilmar International adalah aktor yang turut menyebabkan terjadinya deforestasi. Greenpeace menuntut Wilmar untuk menerapkan *No Deforestation, No No Peat, No Explosion Policy* (NDPE) dengan memperlihatkan peta-peta kesepakatan agar mengetahui seluruh kegiatan dan memutus rantai pasok dengan produsen yang terbukti melakukan deforestasi. Hal ini membuat Greenpeace Indonesia melakukan advokasi terhadap Wilmar International agar berkomitmen untuk menerapkan kebijakan NDPE. Akibat kurangnya *power* dalam pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia, maka Greenpeace Indonesia membentuk suatu jaringan advokasi transnasional untuk membantu menekan Wilmar International agar merubah

kebijakannya. Untuk membentuk jaringan advokasi transnasional serta menekan tindakan Wilmar International, Greenpeace Indonesia menggunakan empat strategi yaitu, politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik pertanggungjawaban.

Literatur ini dijadikan sebagai kerangka konsep dalam penelitian ini karena dapat menggambarkan NGO yang berperan dalam menangani deforestasi hutan akibat industrialisasi minyak kelapa sawit sebagaimana penelitian ini menggambarkan Strategi *International Rivers* dalam penangan potensi kerusakan ekosistem Sungai Mekong akibat industrialisasi energi. Selain itu literatur ini mampu membantu dalam memahami NGO dalam membentuk sebuah jaringan advokasi transnasional yang kemudian menerapkan strategi khusus dalam menanganani permasalahan lingkungan .

Selanjutnya dalam literatur yang berjudul "Keberhasilan Kampanye Anti-Deforestasi Greenpeace terhadap *Asia Pulp And Paper* (APP)" yang ditulis oleh Riza Anastasia. Literatur karya Anastasia ini membahas keberhasilan upaya Greenpeace dalam penangan deforestasi yang disebabkan oleh kegiatan industri *Asia Pulp And Paper* (APP) di Indonesia. Dalam literatur dijelaskan bahwa Greenpeace berupaya berkampanye dengan meminta bantuan dari berbagai macam NGO. Literatur ini menjelaskan bahwa suatu NGO apabila memiliki jaringan advokasi

transnasional yang cukup luas maka semakin mudah untuk berupaya untuk melakukan kegiatan advokasinya. Anastasia menyatakan bahwa *Greenpeace* berupaya meminta bantuan dari berbagai macam NGO lingkungan internasional maupun NGO lokal Indonesia dalam membantu strategi kampanye untuk menekan APP. Greenpeace melakukan kampanye dengan empat strategi jaringan advokasi transnasional. *Greenpeace* menggunakan media dalam melaksanakan strategi informasi politik. Melalui media, *Greenpeace* mengumpulkan informasi dari berbagai NGO lokal dan internasional yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, dan *Eyes on the Forest*. Informasi tersebut akan dipakai untuk berkampanye menyebarkan informasi yang telah dikumpulkan untuk mengajak publik ikut berkampanye. Kampanye dengan menggunakan media yang dilakukan oleh *Greenpeace* sekaligus memperluas jaringan dalam proses berkampanye. Selain itu, *Greenpeace* juga menggunakan strategi simbolik politik dalam menekan APP. *Greenpeace* menggunakan simbol-simbol tertentu untuk mempermudah publik memahami maksud dan tujuan kampanye. *Greenpeace* berkampanye dengan menyebutkan bahwa keselamatan hutan, harimau Sumatera, dan orang utan tergantung pada masyarakat untuk berhenti memakai produk yang dibuat APP dan produk dari *Multi-National Corporation* (MNC) pelanggan APP.

Selain itu *Greenpeace* juga menggunakan strategi politik pengaruh yakni dengan melakukan lobi, *Greenpeace* melakukan lobi terhadap MNC pelanggan APP, seperti *Mattel*, *National Geographic*, dan *Kentucky Fried Chicken* (KFC). Tujuan dari lobi tersebut adalah membujuk MNC pelanggan APP agar menghentikan kerjasama dengan APP. Kemudian, *Greenpeace* melakukan strategi politik akuntabilitas untuk memaksa APP mengurangi tindakan deforestasinya. *Forest Conservation Project* (FCP) merupakan kebijakan APP untuk melakukan konservasi di hutan yang terkena deforestasi. Selain FCP, APP juga mengeluarkan *Sustainability Roadmap Vision 2020*. *Sustainability Roadmap Vision 2020* merupakan rencana APP untuk mengganti bahan baku pembuatan bubur kertas dari kayu hutan menjadi kayu perkebunan dan kayu tanaman disekitar pabrik penebangan.

Penulis menjadikan kajian pustaka ini sebagai acuan untuk melengkapi kajian pustaka pertama, karena kajian pustaka ini menggambarkan bagaimana suatu organisasi internasional non-pemerintah mampu memanfaatkan jaringan advokasi transnasional sebagai sumber kekuatan kampanye dalam menekan kebijakan suatu negara yang ingin mencapai kepentingan nasionalnya melalui industrialisasi. Selain itu kajian pustaka ini juga menjelaskan

bagaimana jaringan advokasi transnasional membantu sebuah organisasi internasional non-pemerintah menerapkan strategi khusus dalam setiap pergerakan kampanye yang dilakukan dalam menekan sebuah kebijakan negara. Kajian pustaka ini memiliki perbedaan dengan kajian pustaka pertama, yang mana pada kajian ini dijelaskan lebih detail bagaimana *Greenpeace* memanfaatkan jaringan advokasi transnasional yang dimiliki untuk memudahkan menerapkan strategi-strategi dalam melakukan kampanye untuk menekan kebijakan negara. Penulis melihat bahwa *Greenpeace* melakukan kampanye dengan mengikuti tahapan pemakaian strategi sesuai dengan urutan pelaksanaan strategi yang terdapat dalam konsep strategi jaringan advokasi transnasional. *Greenpeace* memulai dengan strategi informasi politik untuk memperkuat sumberdaya kampanye sekaligus memperluas jaringan advokasi transnasional yang dimiliki. *Greenpeace* kemudian menerapkan strategi simbolik politik untuk memudahkan membingkai isu bagi publik dengan menyorot keselamatan hutan, harimau Sumatera, dan orang utan akibat tindakan eksploitasi hutan yang dilakukan oleh APP. Setelah melakukan strategi simbolik politik, *Greenpeace* menerapkan strategi pengaruh politik untuk

berupaya melobi aktor-aktor yang terlibat dengan perusahaan APP agar membantu mempengaruhi APP sehingga merubah kebijakannya. Dan strategi yang diterapkan terakhir oleh Greenpeace yang menggunakan strategi pertanggungjawaban politik dalam kampanyenya untuk memaksa perusahaan APP merubah bahan baku dari barang-barang yang diproduksi guna mengurangi dampak deforasti yang dihasilkan.

### 3. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian berjenis deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif akan menghasilkan analisis data yang bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2014). Menurut Sugiyono (2014), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan kepada filsafat positivisme. Yang mana filsafat positivisme merupakan cara pemikiran yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang mana peneliti diposisikan sebagai instrument kunci. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi studi sebelumnya kemudian dikumpulkan atau yang diterbitkan oleh instansi lain (Sekaran, 2011). Maka data sekunder tersebut merupakan data yang

tidak diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data sekunder yang digunakan penulis berupa jurnal ilmiah, buku, serta situs resmi yang dikelola pemerintah, hasil wawancara, observasi, dan riset. Penulis menggunakan level analisis sistem internasional dalam penelitian ini. Penulis menggunakan level analisis sistem internasional karena dapat membantu untuk memahami strategi *International Rivers* dalam menangani potensi kerusakan lingkungan akibat pembangunan Bendungan PLTA Xayaburi oleh pemerintah Laos, yang mana menggunakan strategi jaringan advokasi transnasional. *International Rivers* dalam melaksanakan strategi tersebut bekerjasama dengan berbagai aktor diluar dari berbagai negara sebagai kesatuan dalam penanganan potensi kerusakan lingkungan. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik penelitian dokumenter melalui studi kepustakaan. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode penelusuran di jejaring internet. Kemudian Peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan.

Penelitian ini melalui beberapa tahapan analisis data. Pertama, Penulis akan mengumpulkan dan memilah data mengenai persoalan penelitian, kemudian Penulis melakukan pengolahan data dan dilanjutkan dengan menginterpretasi data dengan memakai konsep Jaringan advokasi transnasional untuk menjawab permasalahan atau objek penelitian. Dalam penelitian ini,

penulis mengumpulkan dan mengelompokkan data-data sekunder yang terkait dengan sistematika penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014), menyebutkan bahwa proses menganalisis data ini disebut *data collection*. Selanjutnya, penulis melakukan *data reduction*. Proses ini adalah proses yang mana penulis memilah data-data yang penting, dan memfokuskan data yang terkait dengan penelitian untuk dirangkum. Kemudian penulis melakukan *data display*, yang mana penulis menyajikan data dalam penelitian kualitatif melalui teks yang bersifat naratif. Proses terakhir yakni *conclusion drawing/verification* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti menggunakan teknik penyajian data yang bersifat naratif. Teknik penyajian data secara naratif merupakan teknik penyajian data yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. (Miles dan Huberman, 1984 dalam Sugiyono 2014). Selain itu penelitian ini juga menyajikan data yang dilengkapi dengan tabel dan grafik sebagai bukti yang mendukung dan memperkuat argumen serta analisa penulis.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 *International Rivers***

*International Rivers* adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang berfokus menangani isu kerusakan ekosistem sungai yang disebabkan oleh usaha negara melakukan industrialisasi. Kampanye

pertama *International Rivers di Laos* adalah menentang pembangunan Bendungan PLTA Theun Hinboun. *International Rivers* melakukan pengawasan Bendungan Theun-Hinboun yang baru selesai dibangun pada tahun 1998 (*International Rivers*, 2007). Bendungan ini mengalihkan air yang berasal dari Sungai Theun ke Sungai Hai dan Hinboun. Proyek pembangunan Bendungan Theun-Hinboun dibangun oleh kemitraan publik - swasta yang kemudian membentuk *Theun-Hinboun Power Company* (THPC). Kemitraan ini terdiri atas kerjasama antara Pemerintah *Electricity due Lao* (EdL), *Nordic Hydropower*, dan *Greater Mekong Subregion* (GMS) *Power Public Lao*, sebuah anak perusahaan dari *GMS Power Public Company Limited Thailand*. Bendungan PLTA *Theun-Hinboun Hydropower Project* (THHP) akan menghasilkan 210 MW. Sembilan puluh lima persen dari pasokan energi yang dihasilkan diekspor ke Thailand, dan lima persen dicadangkan untuk distribusi listrik domestik (*International Rivers*, 2014). Setelah mulai beroperasi pada tahun 1998, bendungan ini berdampak kepada tiga puluh ribu orang di enam puluh enam desa di sepanjang sungai Hai, Hinboun, dan Theu-Kading. Pembangunan bendungan Theu-Hinboun berdampak kepada kondisi perekonomian penduduk. Muncul laporan dari peneliti yang mengungkapkan bahwa penduduk desa melaporkan penurunan tangkapan ikan dari tiga puluh persen hingga Sembilan puluh persen (Shoemaker, 1998). Laporan temuan ini kemudian dibenarkan

oleh pihak internal THPC yang turut melakukan studi (Schouten, 2004 dalam *International Rivers*, 2014). Melihat dampak kerusakan akibat pembangunan Bendungan Theun-Hinboun terhadap penduduk menjadi acuan *International Rivers* untuk lebih kuat berkampanye menekan proyek pembangunan bendungan selanjutnya yakni Bendungan PLTA Xayaburi. Keinginan memperkuat kampanye *International Rivers* tersebut didasari alasan karena Bendungan PLTA Xayaburi dibangun di Sungai Mekong, yang mana Sungai Mekong memiliki sumber daya perairan lebih besar dibandingkan Sungai Theun, Sungai Hai, dan Sungai Hinboun. Jika Sungai Mekong dibendung ditakutkan akan mengganggu ekosistem sungai terpanjang kesepuluh di dunia tersebut (S.Liu, et al. 2009).

#### **4.2 Bendungan Xayaburi**

Dampak pembangunan Bendungan PLTA Xayaburi berpotensi mengancam jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan Bendungan sebelumnya yaitu Theun-Hinboun. Penduduk yang terancam dampak Bendungan PLTA Xayaburi tidak hanya penduduk di Laos, namun juga kemungkinan besar mengancam penduduk di negara Thailand. Hal ini dikarenakan letak Bendungan PLTA Xayaburi yang berlokasi di perbatasan Laos dan Thailand. Potensi kerusakan berupa terganggunya volume air Sungai Mekong mengakibatkan penambahan dan pengurangan volume air perairan Sungai Mekong. Kondisi tersebut dapat

menyebabkan terganggunya potensi sumber daya perikanan dan migrasi lintas batas perikanan di perairan Sungai Mekong. Dalam beberapa tahun sekitar dua ribu hektar lahan pertanian pinggir sungai akan rusak dalam beberapa tahun karena volume air Sungai Mekong yang meluap. Luapan air sejumlah dua ratus dua puluh lima juta meter<sup>3</sup> ini kemudian menyebabkan reaksi kimia yang membuat habitat air yang tidak layak bagi keanekaragaman hewan air (Agostinho, et al. 1999). Selain itu luapan air Sungai Mekong menjadi berlapis-lapis sehingga berpotensi membunuh bibit hewan perairan (Marmulla, 2001 dalam Baran, et al. 2011). Lahan tepi sungai (perairan sungai dangkal) seluas enam puluh kilometer yang sebelumnya merupakan tempat berkembangbiak ikan juga akan terganggu akibat berkurangnya oksigen dalam air karena penambahan lumpur sedimen.

Pembangunan Bendungan tersebut juga diperkirakan mengganggu perikanan Sungai Mekong sebanyak lima puluh persen dari total keseluruhan. Sekitar Tujuh puluh spesies ikan mengalami gangguan migrasi musiman atau bermigrasi untuk berkembangbiak. Tiga jenis diantara spesies ikan tersebut yang terancam punah yakni Ikan Lele Mekong Raksasa, Ikan Hiu Lele Air Tawar, dan Ikan Lele Patin Nasutus (Baran, et al. 2011). Selain mengancam ekosistem Sungai Mekong pembangunan Bendungan PLTA Xayaburi juga mengancam ketahanan pangan penduduk Laos. Berdasarkan laporan

pembangunan ekonomi dan sosial provinsi Xayaburi dari tahun 2000 hingga 2009 bahwa hasil tangkapan ikan di Sungai Mekong mencapai sepuluh ton per tahun (Baran, 2010). Sumber daya perikanan Sungai Mekong juga mendukung ketahanan pangan penduduk di provinsi Luang Prabang. Menurut studi MRC pada tahun 2010, konsumsi penduduk provinsi Luang Prabang mencapai 10.000 ton per tahun. Ekosistem Sungai Mekong dan kehidupan masyarakat Laos yang terancam akibat dampak pembangunan Bendungan PLTA Xayaburi ini menarik perhatian *International Rivers* untuk memulai kampanye menekan pembangunan Bendungan PLTA Xayaburi dalam menangani potensi kerusakan lingkungan sungai Mekong.

#### **4.3 Strategi Jaringan Advokasi Transnasional *International Rivers***

Konsep strategi yang dijelaskan oleh Margareth Keck dan Kathryn Sikkink terbentuk didalam proses penggunaan pola bumerang yang dilakukan oleh *International Rivers*. Pola Bumerang terbentuk diawali oleh *International Rivers* diposisikan mengalami hambatan (ketidakefektifan) pada awal pelaksanaan kampanye. Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa apabila gerakan kampanye mengalami pembatasan dari negara target, pergerakan tersebut kemudian mencari jalan lain dengan membentuk relasi dengan aktor-aktor lain yang memiliki kesamaan *share value* dan *common*

discourse, seperti NGO internasional dan media internasional. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan kekuatan dengan membentuk jaringan advokasi transnasional yang nantinya memberikan tekanan balik kepada negara Laos dalam kampanye menekan pembangunan Bendungan PLTA Xayaburi..

#### **4.3.1 Strategi Informasi Politik *International Rivers***

*International Rivers* memulai pelaksanaan strategi informasi politik dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang detail potensi kerusakan yang ditimbulkan pembangunan Bendungan Xayaburi. Selama melakukan strategi informasi politik, *International Rivers* sekaligus membentuk jaringan advokasi transnasional, karena ada seringnya terjadi interaksi pertukaran informasi melalui media elektronik seperti *e-mail* dan internet dengan aktor-aktor yang dinilai memiliki kesamaan *share valued* dan *common discourse*. *International Rivers* mengumpulkan informasi berupa fakta-fakta dampak pembangunan bendungan sebelumnya yang pernah di bangun di Sungai Mekong, hasil prediksi penelitian para ilmuwan, serta fakta-fakta hasil investigasi di lapangan yang nantinya dijadikan sebagai sumber kekuatan kampanye menekan pembangunan bendungan. Beberapa informasi yang dipakai sebagai sumber kekuatan kampanye *International Rivers* yaitu, fakta-fakta dampak pembangunan Bendungan yang pernah dibangun sebelumnya seperti



Bendungan Mun di Thailand. Fakta membuktikan bahwa setelah bendungan Mun selesai dibangun, lebih dari dua puluh ribu orang terkena dampak penurunan perikanan secara drastis. Hasil tangkapan ikan masyarakat mengalami penurunan enam puluh persen hingga delapan puluh persen, meskipun bendungan telah memakai teknologi *fish passage* sebagai langkah alternatif cara ikan melakukan migrasi. (Kirk, 2012).

Selanjutnya *International Rivers* menggunakan informasi tentang penentangan terhadap pembangunan Bendungan Theun Hinboun di Laos. Setelah pembangunan bendungan selesai pada tahun 1998, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai Theun Hinboun mengalami kerugian diantaranya yakni kerawanan pangan akibat penurunan hasil tangkapan ikan, hilangnya akses menuju sungai yang biasa dijadikan tempat mencari tanaman dan hewan air sebagai bahan makanan pokok, mengalami masalah kesehatan karena kurangnya system sanitasi, dan kegagalan pihak pembangun

Memanfaatkan pemberitaan media masa tentang sikap abainya pemerintah Laos terhadap potensi dampak pembangunan bendungan dan kemampuan membaca dari masyarakat (publik) agar informasi dapat tersampaikan dengan mudah. Media informasi yang digunakan oleh *International Rivers* yakni media cetak seperti poster, petisi, *pamphlet*, dan *briefing paper*, *website*,

*e-news*, dan *electronic press release*. Penyebaran informasi tersebut juga menyebabkan munculnya dukungan dari organisasi non-pemerintah dari negara-negara tepi sungai seperti *Law and Policy Sustainable Development* (LPSD) dari Vietnam, *Samreth Law Group* dari Kamboja, *Community Resource Centre* (CRC) dari Thailand. *Website International Rivers* merupakan media kampanye yang efektif karena dapat menyebarkan informasi secara luas sehingga dapat memperkuat daya dengan mengajak actor lain dalam membantu kampanye sehingga mempermudah penerapan strategi advokasi transnasional didalam upaya-upaya kampanye selanjutnya.

#### **4.3.2 Strategi Simbolik Politik *International Rivers***

Peingimplementasian kampanye ini memanfaatkan objek atau peristiwa sebagai simbol-simbol yang dapat mempermudah mbingkai suatu isu yang didapat melalui identifikasi informasi untuk memperkuat persuasi terhadap publik. *International Rivers* memulai kampanye menggunakan strategi simbolik politik dengan merilis artikel yang berjudul “ *Laos Steamrolls Neighbors in Xayaburi Dam Process* ” pada tanggal 23 Juni 2011. Didalam artikel dijelaskan bahwa pemerintah Laos telah melakukan pelanggaran terhadap proses prosedur PNPCA dengan memutuskan secara sepihak tentang kelanjutan pembangunan bendungan. Kesimpulan dari proses PNPCA merupakan prasyarat bagi keberlanjutan pembangunan

Bendungan Xayaburi untuk menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik dengan otoritas *Electricity Generating Authority Of Thailand* (EGAT). Keputusan sepihak pemerintah Laos sekaligus mempertegas potensi kerusakan bagi dua spesies ikan langka di Sungai Mekong. Tersebar nya berita pelanggaran prosedur PNPCA oleh pemerintah Laos membuat *International Rivers* melakukan reportase langsung di tempat pembangunan bendungan. Berdasarkan hasil reportase, *International Rivers* mengungkapkan bahwa pemerintah Laos telah memulai relokasi desa pertama terhadap 333 penduduk desa Hou Souy secara tersembunyi sejak Bulan Januari. Hasil reportase mengungkapkan bahwa kehidupan penduduk desa Housay Souy hanya bergantung pada uang kompensasi yang sedikit yang diberikan oleh perusahaan Ch. Karnchang. Menurut pengakuan penduduk desa Houay Souy, perusahaan Ch. Karnchang telah melanggar banyak janji terkait relokasi. Sebelum penduduk desa pindah perusahaan menjanjikan tagihan listrik gratis selama satu tahun, tempat tinggal yang layak, lahan perkebunan, dan bekerja di proyek Bendungan PLTA Xayaburi. Namun, janji-janji rekomendasi tersebut tidak dipenuhi dengan tepat oleh perusahaan Ch. Karnchang.

#### **4.3.3 Strategi Pengaruh Politik *International Rivers***

Untuk lebih memperkuat pengaruh kampanyenya, *International Rivers* menerapkan strategi pengaruh politik dengan

bantuan kerjasama bersama NGO dan INGO dari beberapa negara. Dalam penerapan strategi ini *International Rivers* berusaha membujuk MRC dan National Contact Point Austria. MRC merupakan pihak yang diharapkan dapat membantu menekan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah Laos dalam pembangunan Bendungan PLTA Xayaburi karena memiliki wewenang akibat adanya perjanjian *Mekong Agreement* 1995, dan National Contact Point Austria adalah badan pemerintah yang bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik *Organization for economic Cooperation and Development* (OECD) oleh sebuah MNC di suatu negara.

22 November 2011 *International Rivers* berkampanye dengan menerapkan strategi pengaruh politik yang tercermin dalam kerjasama dengan sebuah firma hukum dari Amerika Serikat bernama Perkins Coie. Perkins Coie membantu *International Rivers* dalam membuat sebuah laporan analisa untuk dikirimkan kepada MRC. Laporan tersebut yang menjelaskan bahwa pemerintah Laos telah mengambil tindakan sepihak dalam proses pembangunan bendungan. Dalam laporan tersebut dijelaskan pemerintah Laos telah melanggar proses PNPCA karena tidak ingin menunggu keputusan anggota dewan MRC yang lain dalam mengambil keputusan terkait izin kelanjutan pembangunan Bendungan PLTA Xayaburi. Selain itu pemerintah Laos telah melanggar beberapa ketentuan di dalam *Mekong Agreement* 1995. Upaya kampanye

berikutnya dari strategi yang dilakukan oleh *International Rivers* untuk mempengaruhi MRC dalam menekan pemerintah Laos adalah bekerjasama dengan *Save The Mekong*. Pada tanggal 20 April 2012, *Save The Mekong* mewakili *International Rivers* dan beberapa NGO serta INGO mengirimkan surat terbuka kepada menteri sumber daya alam dan lingkungan yang juga merupakan dewan perwakilan Thailand di MRC untuk meminta klarifikasi tentang kejelasan proses musyawarah penentu kelayakan (*prior consultation*) pembangunan Bendungan PLTA Xayaburi.

#### **4.3.4 Strategi Pertanggungjawaban Politik *International Rivers***

Bersamaan dengan penerapan strategi simbolik politik dan strategi pengaruh politik, pada dasarnya *International Rivers* juga sekaligus menjalankan strategi pertanggung jawaban politik. Strategi ini muncul dan berjalan karena sebenarnya merupakan hasil dari penerapan tiga strategi kampanye yang telah digunakan sebelumnya oleh *International Rivers*. Hasil reportase *International Rivers* pada bulan Juni 2012 yang menjelaskan bahwa perusahaan Ch. Karnchang telah melakukan relokasi secara tersembunyi serta kebohongan janji-janji perusahaan Ch. Karnchang saat melakukan relokasi penduduk desa menyebabkan pemerintah Kamboja dan Vietnam pada tanggal 4 Mei 2012 sepakat bersama-sama mendesak Laos kembali agar

memberhentikan pembangunan bendungan, karena pemerintah Laos terbukti melanggar komitmennya agar menghentikan pembangunan. Pemerintah Kamboja dan Vietnam mengirimkan surat kepada pemerintah Thailand untuk meminta pemerintah Laos agar memperpanjang waktu konsultasi proses PNPCA dan meminta untuk menunggu hasil penelitian kembali yang menunjukkan potensi dampak bendungan secara lebih komprehensif (Radio Free Asia, 2012).

Berlanjut pada 7 Agustus 2012, *Northeastern Community Network in 7 Thailand Provinces* membawa bukti-bukti laporan hasil buatan *International Rivers* mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Thailand terhadap lima lembaga yang terlibat dalam pembangunan bendungan. Kelima lembaga yang terlibat diantaranya yaitu EGAT, *The National Energy Council*, *The Ministry of Energy*, *The Ministry of Natural Resource and Environment*, *The Cabinet*. Gugatan yang mereka ajukan menjelaskan bahwa persetujuan PPA yang disepakati oleh EGAT dan *Xayaburi Power Company Ltd* adalah suatu kesepakatan ilegal karena PPA telah disetujui sebelum mengetahui penilaian dampak lingkungan

dan risiko dampak lintas batas dari pembangunan bendungan diselesaikan atau dirilis, sebagaimana diwajibkan berdasarkan konstitusi Thailand. Terdapat lima lembaga negara yang terduga tersebut dengan tiga alasan yaitu pertama PPA yang ditandatangani EGAT dan *Xayaburi Power Company, Ltd.* Pada Oktober 2011 tidak valid. Kedua, prosedur berjalannya Proses PNPCA termasuk proses kepatuhan hukum yang sebagaimana juga diatur oleh hukum nasional Thailand ternyata belum dipatuhi. Ketiga, Tidak sahnya persetujuan *The Cabinet* dan lembaga yang lain dalam menandatangani PPA (Pianporn, 2012).

Proses persidangan berlanjut pada Februari 2013 dengan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan mereka tertolak disebabkan karena tiga hal yaitu, penggugat tidak dianggap sebagai yang dirugikan, karena *The Cabinet* sebelum menyimpulkan perjanjian jual beli listrik (PPA) dianggap sebagai bagian dari proses administrasi internal. Kedua, perjanjian jual beli listrik (PPA) mengikat pihak kontraktual, seperti EGAT dan *Xayaburi Power Company*, maka dari itu pihak penggugat bukan orang yang

dirugikan. Ketiga, meskipun pihak terdakwa telah melanggar proses PNPCA, namun tidak dianggap sebagai tindakan pelanggaran administratif, sehingga pengadilan tidak dapat melakukan persidangan kasus (Pianporn, 2012).

Penolakan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Thailand membuat *Northeastern Community Network in 7 Thailand Provinces* kembali mengajukan banding ke pengadilan pada Maret 2013. Desember 2015, pengadilan menyatakan bahwa lembaga negara yang terlibat dalam pembangunan Bendungan PLTA Xayaburi telah mematuhi ketentuan hukum Thailand. Menanggapi keputusan pengadilan tersebut, penduduk desa selaku penggugat mengajukan kembali banding kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan cara meminta pemeriksaan ulang kasus ini kepada pengadilan daerah. (*International Rivers*, 2016). Berdasarkan pemaparan diatas dilihat bahwa bagaimana *International Rivers* menerapkan keempat strategi jaringan advokasi transnasional secara bertahap untuk memudahkan pergerakan kampanye dalam menekan pemerintah Laos yang

berupaya membangun secara paksa Bendungan Xayaburi. Setiap pergerakan kampanye *International Rivers* diiringi dengan penerapan masing-masing strategi yang membentuk pola pergerakan seperti bumerang.

## 5. KESIMPULAN

Potensi kerusakan lingkungan akibat pembangunan Bendungan Xayaburi yang muncul tahun 2008 menyebabkan *International Rivers* menerapkan strategi advokasi transnasional dari Keck dan Sikkink dalam berbagai upaya kampanye. Penerapan strategi jaringan advokasi transnasional dalam upaya kampanye tersebut dilakukan untuk mempermudah jalannya langkah-langkah kampanye didalam arah pergerakan kampanye *International Rivers* yang mengikuti pola bumerang..

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Anastasia, R. (2016). *Keberhasilan Kampanye Anti-Deforestasi Greenpeace Terhadap Asia Pulp And Paper (APP)*. (Tesis, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia).

Baran, E., Larinier, M., Marmulla, G. (2011). *Review Of The Fish and Fisheries Aspects In The Feasibility Study and The Environmental Impact Assessment Of The Proposed Xayaburi Dam On The Mekong Mainstream*.

Chitnis, A. (2013). *Why did Laos proceed with the Xayaburi Dam, in the face of strong opposition from neighboring countries?*

Drew, D. M., & Snow, M. D. (2006). *An Introduction to Modern National Security Processes and Problems*. Alabama: Air University Press.

*Electricity Generating Authority Of Thailand*. (n.d.). EGAT Profile. Diambil dari [http://www.egat.co.th/en/index.php?option=com\\_content&view=article&id=140&Itemid=178](http://www.egat.co.th/en/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=178)

Embassy of Finland, Bangkok. *Battery of Asia To Renewable Energy*. Diambil dari <http://www.finland.or.th/Public/default.aspx?contentid=220205>

Helmut, K. A., & Stefan, T. (2010). *International Encyclopedia of Civil Society*. (PDF).

International Centre for Environmental management. (2010). *Strategic Environmental Assessment Of Hydropower On The Mekong Mainstream Final Report*.

*International Rivers*. (2016). *Media Kit on Xayaburi Dam Law Suit*.

*International Rivers*. (n.d.). About *International Rivers*. Diambil dari <https://www.internationalrivers.org/resources/about-international-rivers-3679>.

*International Rivers*. (2014). *Failure to Restore: An Assessment of the Impacts of the Theun-Hinboun Hydropower Dam Projects on Downstream Communities in Laos*.

*International Rivers*. (1948). *Gambling With The Mekong River*

*International Rivers*. (n.d.). Our Work *International Rivers*, Diambil dari: <https://www.internationalrivers.org/resources/about-international-rivers-3679>

*International Rivers*. (2012). *Thai Villagers File Lawsuit on Xayaburi Dam*. Diambil dari <https://www.internationalrivers.org/blogs/254/thai-villagers-file-lawsuit-on-xayaburi-dam>

*International Rivers*. (2007). *Theun-Hinboun Dam and Expansion Project*. Diambil dari <https://archive.internationalrivers.org/campaigns/theun-hinboun-dam-and-expansion-project>

*International Rivers*. (2011). *The SEA Report - Foretelling The Mekong River's Fate*. hal. 3. (PDF).

*International Rivers*. (2011). *The Xayaburi Dam, A Looming Threat To The Mekong River*. Diambil dari: <https://www.internationalrivers.org/resources/the-xayaburi-dam-2635>

*International Rivers*. (2014). *Xayaburi Dam: Timeline of Events*. Diambil dari: [https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached/files/xayaburi\\_dam\\_timeline\\_of\\_events\\_april\\_2014.pdf](https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached/files/xayaburi_dam_timeline_of_events_april_2014.pdf)

*International Rivers*. (2012). *A Proposed Power Development Plan For Thailand 2012*.

J. Valbo-Jorgensen, D. Coates & K.G. Hortle (2009). *Fish diversity in the Mekong River Basin*. In I.C. Campbell (ed.). *The Mekong: Biophysical Environment of an International River Basin*. London: Elsevier Publishers. pp. 161–196

Keck, M. & Sikkink, K. (1998). *Advocacy Networks in International Politics*. Diambil dari <https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt5hh13f>

Kirk, H. (2012). *The Xayaburi Dam: Threatening Food Security In The Mekong*. Kip. (n.d). *Convert between kips and other major units of force*. Lao Peoples's Democratic Republic: Peace Independence Democracy Unity Prosperity (n.d.), National Growth and Poverty Eradiction Strategy, PIDUP, Vientiane.

Lewis, D. 2001, *The Management of Non-Governmental Development Organizations*, [PDF], Available

Lewis, D. 2009, *Nongovernmental Organizations, Definition and History*, [PDF], Available from: <http://personal.lse.ac.uk/lewisd/images/encycliv%20societyngos2009-dl.pdf>

Mekong River Commission. (n.d.) *About Mekong River Commission*, Diambil dari: <https://www.mrcmekong.org/about-mrc/>.

Mekong River Commission. (2010). *State of The Basin Report*. Diambil dari <http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/basin-reports/MRC-SOB-report-2010full-report.pdf>

Mekong River Commission. (2012). *Subject: Reply to Your Request for Clarification on the Prior Consultation for The Proposed Xayaburi Dam*.

Ministry Energy And Mines of Lao PDR, (n.d.) *Linked, MEM*. Diambil dari <http://poweringprogress.org/new/2-uncategorised/3-hydropower-in-lao-pdr>

*Mochtar, Mas'ood*. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta

Virgy, M.A. (2020). *Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia Oleh Wilmar International* (Journal of Political Issues, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia).

Pianporn, D. (2012). *Summary of the Supreme Administrative Court Decision to hear the case submitted by the Network of Thai People in 8 Mekong provinces challenging the Xayaburi Dam Power Purchase Agreement*.

Radio Free Asia. (2012). *Cambodia Lodges Dam Protest With Laos*.

Save The Mekong. (2012). *Subject: Request for Clarifications on the Prior Consultation for the Xayaburi Dam.*

Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods for business Edisi 1 and 2.* Jakarta : Salemba Empat.

S. Liua., P. Lub., D. Liua., P. Jinc., W. Wang. (2009). *Pinpointing the sources and measuring the lengths of the principal rivers of the world.* *International Journal of Digital Earth*, Vol. 2, No. 1, March 2009, 80-87. doi: 10.1080/17538940902746082

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta Bandung

The Association for International Water Studies. (n.d.). *About The Association for International Water Studies.*

The Christian Science Monitor. (2010). 'Laos Turn To Hydropower to be 'Asia's Battery'', *The Christian Science Monitor.*

Trandem, A., *International Rivers.* (2011). *Fatally Flawed Xayaburi EIA Fails to Uphold International Standards: A Preliminary Review of the Environmental Impact Assessment (EIA) Report For the Xayaburi Hydropower Dam on the Mekong River mainstream in Northern Lao PDR.* Diambil dari

WWF. (2014). *NGOs set one-year deadline to stop Xayaburi dam.*